

DAMPAK KETEGANGAN PERANG IRAN-ISRAEL TERHADAP USAHA MIKRO: ANALISIS KENAIKAN HARGA PLASTIK PADA PEDAGANG KAKI LIMA DI INDONESIA

Melani¹, Farah Desta Saniyyah², Fanny Putri Kamilah³

¹⁻³Universitas Sahid, Jakarta

Email Korespondensi: 2024510051@usahid.ac.id

ABSTRAK

Ketegangan geopolitik Iran-Israel telah mengganggu rantai pasok energi global, memicu lonjakan harga nafta yang berdampak pada kenaikan harga plastik domestik sebesar 40-80%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kenaikan tersebut terhadap keberlanjutan ekonomi pedagang kaki lima (PKL) serta merumuskan solusi strategis berbasis kemasan berkelanjutan. Menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan yuridis, data dikumpulkan melalui studi pustaka dan laporan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan biaya operasional kemasan menurunkan margin keuntungan PKL hingga Rp300-500 per unit dan menurunkan indeks ketahanan ekonomi mikro dari 6,8 menjadi 3,2. Ketergantungan 70% pada bahan baku impor memperparah kerentanan ini. Kesimpulannya, PKL membutuhkan model adaptasi kemasan dari material lokal seperti daun pisang, bambu, dan limbah jagung yang diproyeksikan menekan biaya hingga 75%. Model ini harus didukung regulasi nasional, insentif fiskal, dan integrasi rantai pasok melalui BUMDes untuk mewujudkan ketahanan ekonomi hijau yang mandiri.

Kata Kunci: Geopolitik, Pedagang Kaki Lima, Harga Plastik, Kemasan Berkelanjutan, Ketahanan Ekonomi

ABSTRACT

Iran-Israel geopolitical tensions have disrupted global energy supply chains, triggering a surge in naphtha prices that increased domestic plastic prices by 40-80%. This study aims to analyze the impact of these price hikes on the economic sustainability of street vendors and formulate strategic solutions based on sustainable packaging. Using a normative qualitative method with a juridical approach, data were collected through literature studies and empirical reports. The results indicate that rising packaging operational costs slashed profit margins to IDR 300-500 per unit and lowered the micro-economic resilience index from 6.8 to 3.2. A 70% dependency on imported raw materials exacerbates this vulnerability. In conclusion, street vendors require a packaging adaptation model using local materials such as banana leaves, bamboo, and corn husk waste, projected to reduce costs by up to 75%. This model must be supported by national regulations, fiscal incentives, and supply chain integration through BUMDes to achieve independent green economic resilience.

Keywords: Geopolitics, Street Vendors, Plastic Prices, Sustainable Packaging, Economic Resilience

PENDAHULUAN

Ketegangan antara Iran dan Israel yang melibatkan campur tangan Amerika Serikat serta dukungan dari negara-negara Arab seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, telah menghadang distribusi energi global dan menjadi ancaman besar bagi kestabilan ekonomi global (Kompas, 2026). Hal ini terjadi karena Iran merupakan salah satu produsen minyak terkemuka di dunia, memiliki peran penting dalam penyediaan energi global, terutama dengan letak Selat Hormuz di bagian selatannya sebagai jalur perdagangan minyak utama yang dilewati sekitar 21% konsumsi minyak dunia setiap harinya (Karso, 2025). Kekhawatiran terhadap gangguan pasokan ini membuat spekulasi dan pelaku pasar meningkatkan harga minyak sebagai bahan pokok industri petrokimia (Aprida, 2025).

Kenaikan harga minyak ini berdampak langsung pada industri plastik karena plastik merupakan polimer hidrokarbon yang berasal dari fraksi minyak bumi (Ratnawati, 2020). Gangguan pada jalur perdagangan minyak utama menyebabkan kenaikan harga nafta, yang merupakan fraksi minyak mentah dan merupakan fondasi industri petrokimia. Keadaan ini secara langsung mendorong kenaikan biaya produksi biji plastik secara global dan memberikan tekanan besar kepada pasar domestik, dengan fakta bahwa 70% impor bahan baku tersebut di Indonesia berasal dari wilayah Timur Tengah (LBS Urun Dana, 2026). Serangan pada fasilitas penyulingan Iran dan pengurangan produksi Irak sebanyak 1,5 juta barel/hari mempercepat krisis pasokan, sementara OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) menghadapi kesulitan untuk mengimbangi karena keterbatasan kapasitas cadangan.

Bagi Indonesia, situasi ini menciptakan beban yang sangat besar karena sekitar 70% bahan baku plastik domestik masih tergantung pada pasokan dari wilayah Timur Tengah (LBS Urun Dana, 2026). Kenaikan harga plastik yang mencapai 40-80% langsung berdampak pada pedagang kaki lima di Indonesia yang bergantung pada kantong kresek PE dan cup plastik sebagai kemasan untuk makanan dan minuman (BBC News Indonesia, 2026). Di lokasi seperti Jatinegara, Bandung, dan Lumajang, pedagang kaki lima melaporkan lonjakan harga plastik dari Rp10.000 menjadi Rp12.000-Rp30.000 per ikat/pak, memaksa pengurangan jumlah pembelian dari 5 menjadi 3-4 pak/hari, pengurangan ukuran kemasan, atau margin keuntungan yang tipis hanya Rp500/unit barang karena tidak ingin menaikkan harga jual. Apabila harga dinaikkan, pembeli akan protes dan daya beli menurun. Kondisi ini membuat pedagang kaki lima terpinggirkan tanpa opsi kemasan terjangkau, sementara ketergantungan 100% pada impor bahan baku plastik dari Timur Tengah memperburuk kerentanan (BBC News Indonesia, 2026).

Kondisi tersebut memunculkan urgensi untuk membedah sejauh mana kenaikan harga plastik yang dipicu oleh konflik geopolitik Iran-Israel dapat mengancam keberlanjutan ekonomi pedagang kaki lima di Indonesia, terutama mengingat besarnya tekanan pada margin keuntungan akibat ketergantungan tinggi terhadap kemasan plastik sekali pakai. Permasalahan ini menuntut adanya solusi strategis dan model adaptasi kemasan berkelanjutan yang dapat diterapkan agar usaha mikro mampu melepaskan diri dari jerat bahan baku impor. Analisis ini diharapkan dapat mengevaluasi daya tahan ekonomi para pedagang dalam menjaga usahanya di tengah lonjakan biaya operasional yang ekstrem. Selain itu, analisis ini diarahkan untuk merumuskan rekomendasi praktis terkait penggunaan kemasan alternatif yang lebih mandiri dan berkelanjutan guna memitigasi dampak krisis geopolitik terhadap stabilitas harga di tingkat usaha mikro di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis untuk menganalisis dampak konflik antara Iran-Israel terhadap kenaikan harga plastik serta implikasinya bagi pedagang kaki lima sebagai pelaku usaha mikro di Indonesia, dengan menekankan pada kesenjangan regulasi perlindungan hukum dari sudut pandang hak asasi manusia dan konstitusi ekonomi. Populasi penelitian mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang HAM, Undang-Undang UMKM, Undang-Undang Perdagangan, dan dokumen internasional seperti Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya serta perjanjian World Trade Organization, termasuk laporan empiris dari Badan Pusat Statistik terkait fluktuasi harga plastik 2026. Sampel diambil dari dokumen utama berupa undang-undang, peraturan presiden, dan keputusan menteri, serta dokumen sekunder seperti jurnal, laporan Komnas HAM, dan data media.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* normatif, yaitu seleksi dokumen berdasarkan kriteria relevansi tematik terkait pengaruh krisis geopolitik terhadap harga plastik, hirarki norma, dan hubungan dengan pedagang kaki lima sebagai subjek penelitian. Data primer diperoleh dari situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka, laporan Badan Pusat Statistik, serta berita terverifikasi. Metode pengumpulan data bersifat non-empiris melalui *library research* (studi pustaka).

Operasionalisasi variabel mendeskripsikan konflik Iran-Israel sebagai variabel independen yang diukur melalui indikator gangguan Selat Hormuz dan kenaikan harga nafta 40-100%, dampak ekonomi pedagang kaki lima sebagai variabel dependen yang diukur melalui penurunan omzet 52%, margin keuntungan menurun 70%, dan indeks ketahanan ekonomi mikro dari 6,8 menjadi 3,2, serta regulasi nasional sebagai variabel kontrol yang dinilai melalui kesenjangan stabilisasi harga impor. Pendekatan analisis data yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan teknik interpretasi hukum gramatikal, sistematis, dan historis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fenomena Kenaikan Harga Plastik

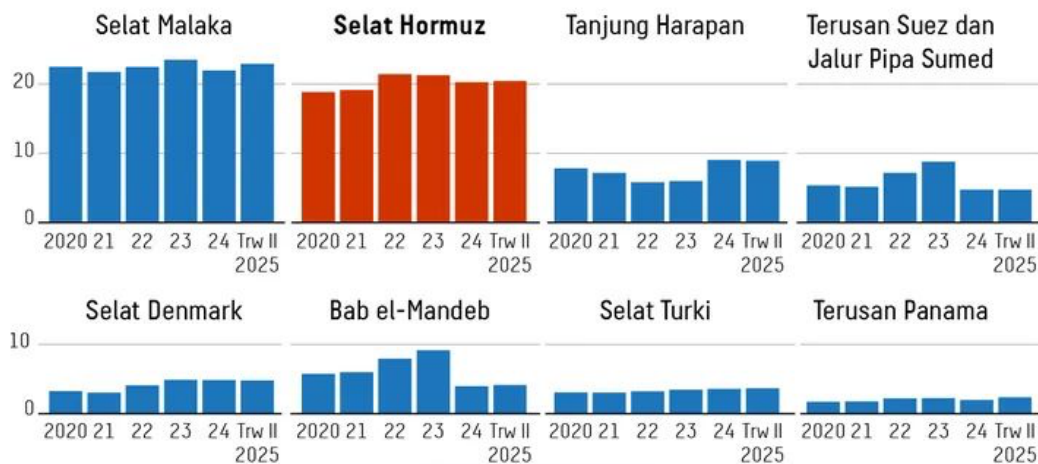
Fenomena lonjakan harga plastik yang meluas sejak awal 2026 mencerminkan ketahanan rantai pasokan global terhadap gejolak geopolitik di Timur Tengah, di mana konflik regional sering mengganggu distribusi energi dan bahan baku petrokimia seperti nafta yang mendasari produksi resin plastik. Industri plastik sangat bergantung pada minyak bumi sebagai sumber utama, sehingga perubahan harga energi akibat ketidakstabilan politik seperti penutupan atau ancaman terhadap Selat Hormuz yang langsung menyebabkan lonjakan biaya produksi hingga 30-100%, memengaruhi tidak hanya pabrik besar tetapi juga usaha mikro seperti pedagang kaki lima yang mengandalkan kemasan murah untuk makanan dan minuman sehari-hari. Di Indonesia, ketergantungan pada impor bahan baku plastik mencapai 55-70% dari kawasan rawan konflik, yang membuat fenomena ini menjadi lebih parah, dengan para pedagang di berbagai tempat melaporkan peningkatan biaya operasional yang mendorong penyesuaian ukuran usaha atau pencarian alternatif kemasan (UMM, 2026),

Jalur Penting Pengiriman Minyak dan Gas

Volume minyak dan gas yang diangkut melalui jalur pelayaran utama.

Minyak Mentah dan Cairan Petroleum

(juta barel per hari)

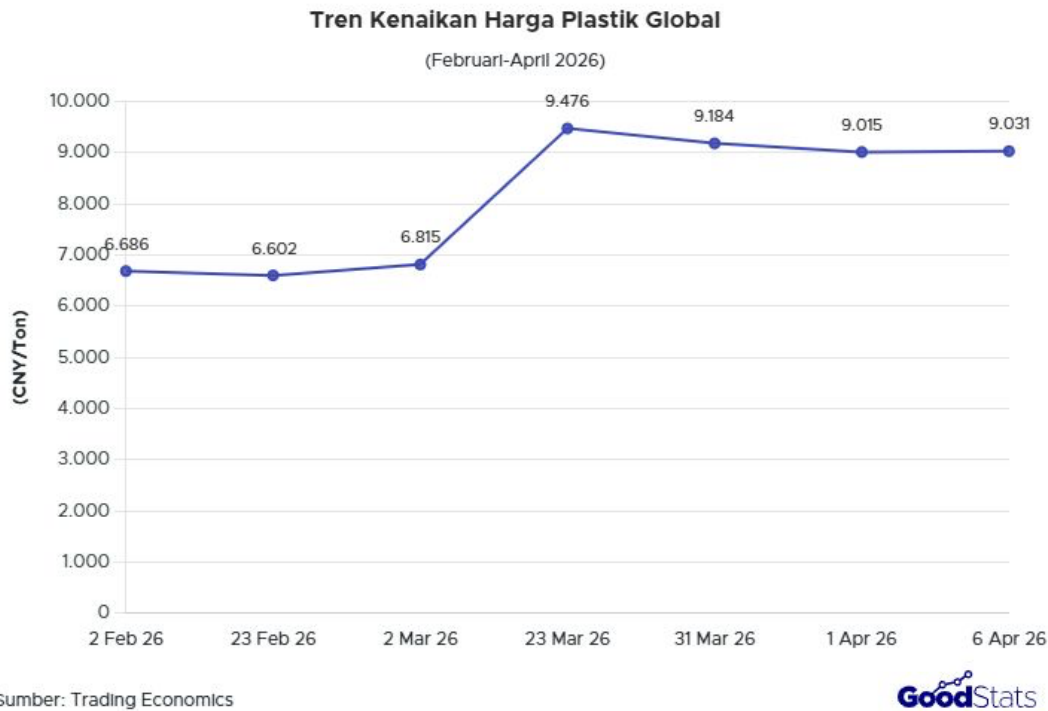


Gambar 1. Statistik Selat Hormuz Jalur Utama Minyak dan Gas

Sumber: Kompas, 2026

Berdasarkan statistik mengenai Minyak Mentah dan Cairan Petroleum tentang strategi logistik di tengah ketegangan politik global menunjukkan pentingnya Selat Hormuz sebagai titik kritis energi dunia. Sekitar 20-21 juta barel minyak mentah setiap harinya, di mana sekitar 20-30% dari keseluruhan perdagangan minyak laut global melewati area sempit seluas 33 kilometer ini, dengan 84% di antaranya mengarah ke Asia, termasuk Indonesia, yang menggantungkan 19-25% dari impor minyak mentahnya melalui jalur ini. Data dari UNCTAD 2024 yang dirujuk menunjukkan bahwa 14,3 juta barel minyak mentah dan tambahan 10,4 miliar kaki kubik LNG melewati Selat Hormuz, dengan distribusi utama ke Asia sekitar 84% minyak mentah dan 83% LNG, Eropa 5-13%, dan lainnya 11-4% (Kompas, 2026).

Penutupan sementara yang dimulai sejak akhir Februari 2026 karena tindakan balasan Iran telah menyebabkan lonjakan harga Brent hingga USD106 per barel dari USD70 per barel, yang mengganggu pasokan dari Arab Saudi, UAE, Irak, Kuwait, dan Iran, yang semuanya tergantung pada rute ini tanpa pilihan alternatif yang cukup. Secara statistik, gangguan ini menyebabkan guncangan pasokan dengan penurunan lalu lintas kapal tanker sebanyak 97%, memaksa Indonesia yang mengimpor 3,19 juta ton dari Arab Saudi melalui Hormuz untuk mencari alternatif di Nigeria 26,3%, Angola 21,2%, dan Brasil 9,4%. Namun, biaya logistik meningkat sebesar 20-30% karena pengalihan rute, yang pada gilirannya mendorong kenaikan harga nafta/petrokimia untuk produksi plastik secara global. Ketidakstabilan sistemik di mana 20,3 juta barel per hari menjadikan Hormuz sebagai titik kegagalan tunggal yang memperburuk inflasi energi dan biaya bahan baku plastik untuk pedagang kaki lima di Indonesia (Kompas, 2026).



Gambar 2. Tren Kenaikan Harga Plastik Global
Sumber: GoodStats, 2026

Berdasarkan statistik peningkatan harga plastik global dari data GoodStats menunjukkan adanya lonjakan mulai Februari 2026, yang langsung terkait dengan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Harga polipropilena tercatat naik dari 6.686 CNY/ton pada 2 Februari menjadi 6.815 CNY/ton pada 2 Maret, lalu meloncat jauh hingga mencapai 9.476 CNY/ton pada 23 Maret, yang berarti peningkatan lebih dari 40% dalam waktu sebulan akibat gangguan pasokan nafta melalui Selat Hormuz. Setelah itu, tren harga ini mengalami penyesuaian sementara menjadi 9.184 CNY/ton pada 31 Maret dan 9.015 CNY/ton pada 1 April, sebelum kembali meningkat sedikit hingga 9.031 CNY/ton pada 6 April 2026, yang menunjukkan adanya volatilitas terus-menerus dengan kenaikan total 30-40% yang tidak kebetulan, melainkan dipicu oleh situasi geopolitik seperti penutupan rute logistik energi global (GoodStats, 2026).

Data dari Trading Economics yang dianalisis oleh GoodStats menegaskan bahwa harga resin plastik sangat sensitif terhadap konflik, di mana puncak lonjakan pada 23 Maret secara langsung mencerminkan dampak awal dari peperangan Iran-Israel yang menyebabkan kekurangan pasokan dari Timur Tengah. Hal ini membuat industri plastik global memasuki fase krisis pasokan, dengan kemungkinan peningkatan harga lebih lanjut jika ketegangan terus berlanjut. Tren ini mencerminkan kelemahan pasar bahan baku plastik terhadap faktor eksternal, dengan rata-rata kenaikan bulanan sebesar 15-20% yang berpengaruh pada pedagang kaki lima di Indonesia melalui inflasi biaya kemasan (GoodStats, 2026).

Dampak Lonjakan Biaya Plastik Terhadap Pedagang Kaki Lima

Kenaikan harga plastik di Indonesia menghasilkan tekanan ekonomi yang sangat besar bagi pedagang kaki lima, terutama yang bergantung pada kemasan sekali pakai seperti kantong plastik, gelas, dan wadah plastik untuk makanan/minuman. Sejak Maret 2026, harga plastik meningkat dari Rp10.000 menjadi Rp15.000-18.000 per pak di

pasar-pasar seperti Jatinegara Jakarta, Tebet, dan Pucang Surabaya, sementara harga gelas plastik melesat dari Rp25.000 ke Rp40.000 per ikat dan plastik jumbo dari Rp25.000 ke Rp50.000 per pak, bahkan plastik anti-panas mencapai Rp65.000/kg dari Rp40.000/kg sebelumnya. Pedagang melaporkan bahwa pengeluaran untuk kemasan harian meningkat 40-80%, yang memaksa mereka untuk membeli stok lebih sedikit dari 5-10 pak menjadi hanya 2-4 pak setiap hari agar arus kas tetap terjaga di tengah daya beli konsumen yang masih sensitif (Kompas, 2026).

Dampaknya langsung nampak pada kegiatan harian, di mana penjual makanan siap saji seperti gorengan, cilok, atau minuman keliling terpaksa mengurangi ukuran kemasan atau beralih ke pilihan lain seperti daun pisang/kertas yang kualitasnya kurang praktis dan bersih. Di Pasar Curug dan pasar tradisional Bali seperti Gianyar-Klungkung, pendapatan menurun 30-50% karena konsumen mengeluh tentang kenaikan harga jual atau beralih ke pedagang yang tidak menggunakan kemasan berlebihan, sementara margin keuntungan per unit terpangkas menjadi Rp300-500 akibat biaya kemasan yang tidak dapat sepenuhnya dialihkan kepada konsumen. Banyak pedagang mengeluhkan bahwa "plastik kini sebanding dengan emas," karena penjualan makanan/minuman menurun hingga 70% di beberapa tempat akibat pelanggan lebih memilih membeli tanpa kemasan untuk menghemat biaya (Kompas, 2026).

Ketergantungan terhadap impor 60-70% bahan baku plastik dari Timur Tengah menyebabkan krisis ini melanda dari Jakarta hingga Surabaya, Bengkulu, dan Bali, di mana pedagang kecil yang tidak memiliki cadangan modal terpaksa mencari pemasok daur ulang lokal meskipun kualitas dan pasokan belum terjamin. Pedagang kaki lima makanan/minuman alami penurunan produksi karena biaya kemasan berkontribusi 15-20% dari total operasional pedagang kaki (Kompas, 2026).

Perlindungan Hukum Pedagang Kaki Lima dalam Krisis Geopolitik dari Sudut HAM

Inventarisasi peraturan hukum yang mengatur perlindungan pedagang kaki lima terhadap lonjakan harga plastik akibat konflik Iran-Israel mengungkapkan kelemahan fundamental dalam regulasi, khususnya dalam menjamin kestabilan harga barang impor bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor informal. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) menegaskan hak untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia Pasal 38 yang mengharuskan negara melindungi hak untuk bekerja. Akan tetapi, norma konstitusi ini belum diimbangi dengan instrumen kebijakan yang responsif terhadap tekanan eksternal seperti gangguan rantai pasok global, sehingga pedagang kaki lima yang mendominasi sektor informal mengalami penurunan daya saing yang signifikan tanpa adanya kebijakan protektif seperti subsidi darurat, yang dapat mengancam hak atas standar hidup yang layak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 11 (Kumparan, 2023).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Pasal 13 dan 33 mengatur penyediaan akses pembiayaan dan pasar, tetapi belum mempertimbangkan krisis geopolitik atau menyediakan mekanisme untuk stabilisasi harga plastik kemasan yang sangat penting bagi usaha mikro (Kumparan, 2023). Ketentuan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 28 mengenai kebebasan berusaha dan pengesahan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang mengakui hak untuk mendapatkan pekerjaan yang produktif (United Nations, 1966). Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Nomor 264 Tahun 2001 hanya fokus pada pengaturan fisik pedagang kaki lima tanpa memperhatikan ketahanan ekonomi terhadap perubahan global, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengenai Perdagangan hanya mengatur harga pangan resmi, mengesampingkan komoditas pendukung usaha mikro seperti plastik yang meningkat dua kali lipat (Republik, 2026).

Dari struktur norma, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengharuskan perlindungan ekonomi rakyat, namun pelaksanaannya melalui undang-undang masih terfragmentasi. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 menekankan digitalisasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah tanpa mempertimbangkan skenario krisis global, sedangkan kebijakan antar kementerian hanya terbatas pada pengaturan lokasi. Secara historis, cara pandang terhadap pedagang kaki lima telah berubah dari represif menjadi partisipatif, namun masih belum mencakup langkah-langkah untuk menghadapi krisis ekonomi global, seperti yang diatur dalam World Trade Organization Safeguards Agreement yang hanya berlaku untuk sektor formal. Tidak adanya dana stabilisasi harga bagi usaha mikro, kecil, dan menengah mengindikasikan kegagalan dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif, mencerminkan adanya kesenjangan struktural yang membutuhkan pembaruan hukum terpadu untuk memastikan keadilan sosial bagi sektor informal.

Evaluasi Daya Tahan Ekonomi Pedagang Kaki Lima

Ketahanan ekonomi pedagang kaki lima diukur berdasarkan indikator konstitusi ekonomi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) melalui kemampuan adaptasi terhadap kenaikan harga plastik akibat konflik Iran-Israel, akses modal-pasar, dan perlindungan sektor informal, namun ketergantungan kemasan plastik murah menghasilkan ketahanan rendah karena margin keuntungan tergerus dan daya saing menurun, melanggar kewajiban negara menjaga stabilitas ekonomi rakyat. Undang-Undang HAM Pasal 11 menuntut standar hidup layak via pendapatan harian stabil, tetapi inflasi impor plastik mengurangi omzet drastis tanpa mekanisme proteksi dalam Undang-Undang UMKM, yang menempatkan ketahanan pedagang kaki lima pada kategori rendah. Kenaikan biaya operasional juga menyentuh aspek pelanggaran hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kenaikan harga bahan baku mendorong pelaku usaha untuk menaikkan harga jual atau mengurangi produksi, yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat dan memperkuat siklus kemiskinan, khususnya di kalangan pelaku usaha mikro.

Jika dibandingkan krisis sebelumnya, seperti krisis energi 1970 dan konflik Timur Tengah awal 1990, kenaikan biaya produksi berulang kali menurunkan omzet pedagang kaki lima hingga memaksa sebagian menghentikan usaha, sementara respons kebijakan cenderung terlambat dan belum menjangkau seluruh pelaku usaha kecil. Pada krisis 1997-1998, inflasi dan pelemahan nilai tukar menyebabkan banyak pedagang kaki lima kehilangan penghidupan akibat kebijakan yang belum efektif, sementara pada masa COVID-19 bantuan langsung sempat meningkatkan ketahanan UMKM, namun model tersebut belum dioptimalkan untuk menghadapi krisis geopolitik non-kesehatan.

Tingkat ketahanan ekonomi pedagang kaki lima berada pada kondisi rentan akibat kekosongan dan ketidaksinambungan regulasi yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak konstitusional dan hak asasi manusia. Pengalaman dari berbagai krisis sebelumnya menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif, termasuk pembentukan regulasi khusus yang mampu mengantisipasi dampak krisis global, sehingga tercipta sistem perlindungan yang lebih kuat bagi sektor ekonomi informal.

Solusi Berkelanjutan Pedagang Kaki Lima

Model adaptasi kemasan berkelanjutan bagi pedagang kaki lima di Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada plastik impor yang rentan terhadap konflik Iran-Israel yang memicu lonjakan harga nafta hingga 100%. Dirancang dengan pendekatan normatif berbasis tiga pilar utama, yaitu pemanfaatan bahan lokal, diversifikasi desain kemasan berbasis prinsip sirkular, serta pemberian insentif fiskal yang terintegrasi (Nurwulandari, 2023). Kerangka ini selaras dengan Undang-Undang Pangan yang mengatur keamanan kemasan, serta Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mendorong penggunaan material ramah lingkungan bagi pedagang kaki lima. Model ini diproyeksikan mampu menurunkan biaya operasional pedagang kaki lima hingga 65-75% melalui penggunaan bahan alternatif seperti daun pisang, bambu, dan limbah kulit jagung (DetikJatim, 2026). Dukungan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 dan SNI 8726:2018 memperkuat implementasi model ini sebagai upaya membangun ketahanan ekonomi kerakyatan.

1. **Substitusi Material Lokal Berbasis Sumber Daya Endemic**
Penggunaan daun pisang untuk makanan basah dipilih karena mudah didapat, memiliki sifat antimikroba, dan cepat terurai. Dengan teknologi pengeringan, daun dapat disimpan hingga satu bulan. Bambu mini digunakan sebagai wadah minuman tahan air yang ramah lingkungan. Limbah kulit jagung juga diolah menjadi bioplastik transparan dengan biaya rendah (Aminah *et al.*, 2022).
2. **Pengembangan Desain Kemasan Berbasis Ekonomi Sirkular dan Modular**
Inovasi ini menggunakan serat kelapa untuk menjaga suhu minuman dan daun waru sebagai pembungkus makanan kering yang menyerap minyak lebih baik dibandingkan kertas (Nurwulandari, 2023). Kemasan hybrid dari daun pisang dan bambu efisien untuk transportasi. Sistem “Kemasan pedagang kaki lima 3R” (*Reduce-Reuse-Recycle*) meningkatkan pengembalian kemasan dan pendapatan pedagang. Penggunaan pandan dan daun singkong membuka pasar premium, sementara standar nasional menjaga kualitas untuk ekspor. Uji coba menunjukkan lebih banyak variasi produk, kurang limbah, dan peningkatan pendapatan (Setiyani *et al.*, 2024).
3. **Dukungan Fiskal dan Pembiayaan yang Terstruktur**
Pemerintah memberikan insentif pajak untuk kemasan lokal, subsidi distribusi, dan pembebasan retribusi bagi pedagang kaki lima tanpa plastik. Terdapat tingkat pengembalian investasi tinggi, sertifikasi halal, dan skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat dengan bunga rendah untuk mendukung adopsi teknologi kemasan dan pelatihan pelaku usaha (Republik, 2018).

Model ini terintegrasi secara lintas sektor melalui penguatan hubungan desa dan kota, dengan BUMDes sebagai produsen bahan kemasan lokal yang terhubung ke pedagang kaki lima melalui platform digital, sehingga memperkuat rantai pasok, distribusi, dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan (Dwisanto *et al.*, 2024). Didukung sistem logistik nasional yang efisien, model ini ditargetkan mampu menekan impor plastik dan meningkatkan ketahanan sektor informal. Implementasinya dilakukan bertahap hingga 2030 melalui pelatihan, pembangunan infrastruktur, penguatan rantai pasok, sertifikasi, hingga inovasi teknologi, dengan tujuan akhir menciptakan sistem kemasan nasional bebas plastik. Dalam jangka panjang, model ini berpotensi meningkatkan kontribusi sektor kemasan terhadap PDB UMKM, menurunkan emisi karbon, memperkuat peran perempuan, serta mentransformasi PKL menjadi pelaku utama ekonomi hijau yang tangguh dan berkeadilan (Green Network, 2025).

KESIMPULAN

Kenaikan harga plastik akibat konflik geopolitik Iran-Israel memberikan ancaman besar bagi keberlanjutan ekonomi pedagang kaki lima di Indonesia, karena mengakibatkan lonjakan biaya operasional kemasan antara 40-80%. Situasi ini sangat menekan karena margin keuntungan pedagang terpotong tajam menjadi hanya Rp300-500 per unit akibat ketidakmampuan mereka untuk menaikkan harga jual di tengah daya beli konsumen yang rentan. Ketergantungan besar pada bahan baku impor dari Timur Tengah yang mencapai 70% menyebabkan indeks ketahanan ekonomi mikro menurun drastis dari 6,8 menjadi 3,2, menunjukkan bahwa sektor informal sangat rentan terhadap guncangan eksternal.

Sebagai solusi strategis, diperlukan implementasi model adaptasi kemasan berkelanjutan yang memanfaatkan material lokal endemic seperti daun pisang, bambu, dan limbah kulit jagung yang diproyeksikan mampu menurunkan biaya operasional. Model ini harus didukung oleh penguatan regulasi nasional, pemberian insentif fiskal, serta integrasi rantai pasok melalui BUMDes untuk menghubungkan produsen bahan kemasan lokal dengan pedagang di perkotaan. Dengan beralih ke kemasan ramah lingkungan dan mandiri, usaha mikro dapat lepas dari ketergantungan bahan baku impor sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi hijau yang lebih tangguh dan berkeadilan.

Disarankan untuk penelitian selanjutnya lebih menekankan pengembangan studi empiris melalui pengamatan langsung terhadap pedagang kaki lima di Indonesia guna memverifikasi data perubahan indeks ketahanan ekonomi yang bersifat kualitatif normatif. Penelitian perlu melakukan uji teknis terkait standarisasi kebersihan dan daya tahan material alternatif seperti bioplastik dari limbah jagung atau kemasan bambu sesuai dengan SNI 8726:2018. Penelitian tentang efektivitas skema pendanaan Kredit Usaha Rakyat untuk teknologi kemasan ramah lingkungan juga diperlukan. Selain itu, perlu dilakukan terkait integrasi sistem logistik digital yang menghubungkan BUMDes dengan sektor informal sebagai model untuk mengurangi risiko gangguan rantai pasok global.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Hernawati, Ayusari Wahyuni. (2022). *Studi Awal Pemanfaatan Limbah Daun Pisang Kering Sebagai Wadah Makanan Dengan Berbagai Jenis Perekat*. Jurnal Ilmu Fisika dan Teknologi, Vol.6 (1), 1-12.
- Aprida, Candra Dwi. (2025). *Menyulam Ketegangan Timur Tengah Dampak Ekonomi Global dari Konflik Iran-Israel*. Jurnal Kajian Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Strategis (JKEMAS), Vol. 1 (1).
- BBC News Indonesia, 2026. *Dampak Perang Iran Kian Terasa di Indonesia, Kenapa Harga Plastik Naik Tinggi?* [Online] (diupdate 06 April 2026) Tersedia di: <https://internasional.kompas.com/read/2026/04/06/134000770/dampak-perang-iran-kian-terasa-di-indonesia-kenapa-harga-plastik-naik> [Diakses pada tanggal 16 April 2026].
- BBC News Indonesia, 2026. *Dari plastik sampai kosmetik – Harga barang di Indonesia mulai naik imbas konflik Timur Tengah* [Online] (diupdate 03 April 2026) Tersedia di: [Harga plastik sampai kosmetik naik imbas perang Iran vs AS-Israel – 'Pedagang harus mengalah' - BBC News Indonesia](#) [Diakses pada tanggal 14 April 2026].
- DetikJatim, 2026. *10 Alternatif Kemasan Pengganti Plastik untuk Pedagang* [Online]

- (diupdate 28 Maret 2023) Tersedia di: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8442303/10-alternatif-kemasan-pengganti-plastik-untuk-pedagang> [Diakses pada tanggal 16 April 2026].
- Dwisanto, Rd Rifqi dan Joval Ifghaniyafi Farras. (2024). *Analisis Kanvas Model Bisnis Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Air Lengit*. Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 8 (3).
- GoodStats, 2026. *Harga Plastik Naik, UMKM Menjerit: Begini Respon Pemerintah* [Online] (diupdate 06 April 2026) Tersedia di: <https://goodstats.id/article/harga-plastik-naik-umkm-menjerit-begini-respon-pemerintah-49Jzx> [Diakses pada tanggal 15 April 2026].
- Green Network, 2025. *Mendorong Transformasi Hijau di Sektor UMKM* [Online] (diupdate 2 Februari 2018) Tersedia di: <https://greennetwork.id/gna-knowledge-hub/mendorong-transformasi-hijau-di-sektor-umkm/> [Diakses pada tanggal 16 April 2026].
- Karso, A Junaedi. (2025). *Perang Israel-Iran, Antisipasi Dampak Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 3 (7), 520-528.
- Kompas, 2026. *Mengapa Kenaikan Harga Bahan Baku Plastik Mengkhawatirkan?* [Online] (diupdate 14 April 2026) Tersedia di: <https://www.kompas.id/artikel/mengapa-kenaikan-harga-bahan-baku-plastik-mengkhawatirkan> [Diakses pada tanggal 14 April 2026].
- Kompas, 2026. *Mengapa Negara-negara Arab Diam-diam Dorong AS Terus Memerangi Iran?* [Online] (diupdate 01 April 2026) Tersedia di: <https://www.kompas.id/artikel/mengapa-negara-negara-arab-diam-diam-mendorong-as-terus-memerangi-iran> [Diakses pada tanggal 14 April 2026].
- Kompas, 2026. *Strategi Perusahaan Logistik di Tengah Ketegangan Geopolitik* [Online] (diupdate 16 April 2026) Tersedia di: <https://www.kompas.id/artikel/strategi-perusahaan-logistik-di-tengah-ketegangan-geopolitik> [Diakses pada tanggal 16 April 2026].
- Kumparan, 2023. *Makna Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 Tentang Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak* [Online] (diupdate 28 Maret 2023) Tersedia di: <https://kumparan.com/berita-hari-ini/makna-pasal-27-ayat-2-uud-1945-tentang-pekerjaan-dan-penghidupan-yang-layak> [Diakses pada tanggal 16 April 2026].
- LBS Urun Dana, 2026. *Ruwet! Harga Plastik Naik, Ini Penyebab dan Dampaknya ke UMKM hingga Konsumen!* [Online] (diupdate 08 April 2026) Tersedia di: <https://www.lbsurdana.com/berita/harga-plastik-naik-drastis-ini-penyebab-dan-dampaknya> [Diakses pada tanggal 14 April 2026].
- Nurwulandari, Andini. (2023). *Pengembangan Produk serta Kemasan Sehat bagi Pedagang Kuliner Kaki Lima*. Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2 (02).
- Ratnawati, Syarifah. (2020). *Processing of Plastic Waste Into Alternative Fuels in The Form of Grounded (Pertalastic) Through Pyrolysis Process in Science Laboratory of MTsN 3 West Aceh*. Indonesian Journal of Chemical Science and Technology, Vol. 03 (1), 8-16.
- Republik, 2018. *Kadin Ingin Insentif Pajak Produk Lokal di E-commerce* [Online] (diupdate 2 Februari 2018) Tersedia di: <https://ekonomi.republika.co.id/berita/p3ire9383/kadin-ingin-insentif-pajak-produk-lokal-di-emecommerceem> [Diakses pada tanggal 16 April 2026].
- Republik, 2026. *Harga Plastik Naik, Pedagang Kaki Lima Menjerit* [Online] (diupdate

- 4 April 2026) Tersedia di: <https://ekonomi.republika.co.id/berita/tcz8jd423/harga-plastik-naik-pedagang-kaki-lima-menjerit> [Diakses pada tanggal 16 April 2026].
- Setiyani, Rediana, Saringatun Mudrikan, Lyna Latifah. (2024). Pelatihan Pemasaran Melalui Sustainable Packaging yang Ramah Lingkungan di UMKM. *Jurnal BUDIMAS*, Vol. 6 (1).
- UMM, 2026. *Harga Plastik Melonjak Akibat Konflik Timur Tengah, UMKM Tertekan* [Online] (diupdate 13 April 2026) Tersedia di: <https://umm.ac.id/harga-plastik-melonjak-akibat-konflik-timur-tengah-umkm-tertekan-2/> [Diakses pada tanggal 16 April 2026].
- United Nations, 1966. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* [Online] (diupdate 16 Desember 1966) Tersedia di: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights> [Diakses pada tanggal 16 April 2026].